

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali Abdullah. 2014. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amendemen*. Kencana. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- Asmuni. 2017. *Konsep Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara*. Setara Press. Malang.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Irvan Mawardi. 2016. *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Philipus M Hadjon dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Safri Nugraha dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Center Of Law and Goverment Studies. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Yopie Immanuel Patiro. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Keni Media. Bandung.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 80-81.
- JCT Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta:Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm. 38
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma jaya Yogyakarta, 2008, hlm. 72.

MAJALAH

- Dewi Sendhikasar, 2016 *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota Ke Provinsi*, Majalah Info

Singkat Pemerintahan dalam Negeri Vol. VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016, Jakarta.

INTERNET

<https://sulselprov.go.id/welcome/post/gubernur-pengangkatan-kepala-sekolah-atas-usulan-kepala-daerah-setempat>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 36 tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

SKRIPSI :

Sella Nova Damayanti. 2017. ***Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi.*** Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Telepon 586083, Fax 585257
MAKASSAR 90245

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 6030 -SEKRET.2/DISDIK


Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : **NURHAENI**
Nomor Pokok : B12114316
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS
Judul Penelitian : Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan Kepala Sekolah
Menengah Atas dan/atau Sederajat oleh Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2016

Telah melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
terhitung dari tanggal 01 s/d 30 Desember 2019.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Juni 2021

a.n. KEPALA DINAS
SEKRETARIS,

SUMIHARTO, SE., M.Ed.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19680829 198903 1 009

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar
2. Pertinggal.